

Pembangunan IKN: Kajian Kritis pada Model Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan

Rakhdinda Dwi Artha Qairi¹Ilmu Administrasi Publik, Universitas Muhammadiyah Palangka Raya¹Email Korespondensi Author: rakhdindadwiarthaqairi@umpr.ac.idThis is an open access article under the [CC BY 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/) license.**Kata kunci:**IKN; Pembangunan Kota;
Keberlanjutan Ekologis;
Smart Governance**Abstrak**

Penelitian ini bertujuan untuk mengevaluasi secara kritis model pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam mencerminkan prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta kesiapan digital. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi terhadap dokumen resmi IKN, laporan Otorita IKN, dan artikel jurnal akademik. Kajian ini menunjukkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah mengadopsi prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta transformasi digital, namun implementasinya masih menghadapi tantangan struktural. Keterlibatan masyarakat dan aktor non-negara masih sebatas konsultatif dan belum deliberatif sebagaimana prinsip New Public Governance (NPG), sementara pelaksanaan prinsip FPIC bagi masyarakat adat masih lemah. Di sisi digital, meskipun pengembangan SPBE dan One Data Indonesia telah dimulai, fragmentasi regulasi, rendahnya literasi digital birokrasi, dan belum kuatnya sistem keamanan data menjadi kendala utama. Oleh karena itu, integrasi ketiga dimensi secara inklusif dan sistemik menjadi prasyarat agar IKN dapat benar-benar menjadi prototipe kota masa depan yang modern, adil, dan berkelanjutan. Temuan ini menegaskan pentingnya integrasi tata kelola kolaboratif, keadilan sosial-ekologis, dan transformasi digital yang inklusif dalam desain pemerintahan kota masa depan di Indonesia.

Keywords:IKN; City Development;
Ecological Sustainability;
Smart Governance**Abstrack**

This study aims to critically evaluate the National Capital City (IKN) governance model in reflecting the principles of modern governance, ecological and social sustainability, and digital readiness. This study uses a qualitative approach with a documentation study method on official IKN documents, IKN Authority reports, and academic journal articles. This study shows that the National Capital City (IKN) development has adopted the principles of modern governance, ecological and social sustainability, and digital transformation, but its implementation still faces structural challenges. The involvement of the community and non-state actors is still limited to consultative and not deliberative, as in the principles of New Public Governance (NPG). In contrast, implementing the FPIC principle for indigenous peoples is still weak. On the digital side, although the development of SPBE and One Data Indonesia has begun, fragmentation of regulations, low digital literacy of the bureaucracy, and weak data security systems are the main obstacles. Therefore, integrating the three dimensions inclusively and systemically is a prerequisite for the IKN to become a prototype of a modern, just, and sustainable future city. These findings emphasize the importance of integrating collaborative governance, socio-ecological justice, and inclusive digital transformation in the design of future city governance in Indonesia.

Pendahuluan

Pemerintah Indonesia sedang melaksanakan pemindahan Ibu Kota Negara atau dikenal dengan Ibu Kota Nusantara (IKN) ke Kalimantan dengan tujuan mewujudkan kota berkelanjutan, digital, dan inklusif—sebuah langkah berani yang diharapkan memecah dominasi Jakarta dan mendistribusikan pembangunan ke wilayah lain (Nurkaidah, Anas, & Baharuddin, 2024; Rifaid, Rachman, Baharuddin, & Gohwong, 2023). Namun demikian, perencanaan yang ambisius ini juga menimbulkan risiko nyata: ketimpangan ekologis, ketidakpastian hak adat, serta tantangan pendanaan yang kompleks (Hernawan, 2023; Ibrahim, Baharuddin, & Wance, 2023b; Kalalinggi, Hisdar, Sarmiasih, & Wijaya, 2023; Rifaid, Abdurrahman, Baharuddin, & Kusuma, 2023). Selain itu, birokrasi yang tersentralisasi dan cepatnya

adopsi teknologi tanpa kesiapan kelembagaan dapat menghasilkan kesenjangan implementasi antara visi dan kenyataan operasional (Ibrahim, Baharuddin, & Wance, 2023a; Pratama & Imawan, 2019). Oleh karena itu, diperlukan kajian kritis yang menelaah sejauh mana model pemerintahan di IKN benar-benar mampu mewujudkan tata kelola modern, partisipatif, dan berkelanjutan.

Pada beberapa studi, penerapan *smart governance* dan e-government terbukti memperkuat kapabilitas kelembagaan lokal melalui perbaikan transparansi dan proses pelayanan publik (Cardullo, 2020; Herdiyanti, Hapsari, & Susanto, 2019; Ruhlandt, 2018). Namun, studi di Indonesia menyebutkan bahwa implementasi SPBE masih belum merata, dengan disparitas besar antar daerah terutama dalam tingkat akses data publik dan keterlibatan warga (Kencana et al., 2023; Yulianto, Hakim, Noor, & Suryadi, 2023; Zitri, Rifaid, & Lestanata, 2023). Dalam konteks Indonesia, SPBE dan *One Data* menjadi instrumen kunci, namun tantangan regulasi dan sinkronisasi antar-lembaga belum sepenuhnya teratasi (Hardi, Nurmandi, Purwaningsih, & Manaf, 2025). Dengan demikian, meskipun smart governance dan e-government telah menunjukkan dampak positif di beberapa wilayah, penerapannya masih menghadapi ketimpangan signifikan di tingkat nasional. Hal ini menunjukkan bahwa keberhasilan implementasi SPBE dan One Data di IKN sangat bergantung pada penguatan regulasi, harmonisasi antar-lembaga, serta peningkatan kapasitas digital secara merata.

Di sisi lainnya, rencana pengembangan *forest city* di IKN menekankan konservasi sumber daya alam, keterlibatan komunitas lokal, dan pembangunan rendah karbon, yang didukung oleh perencanaan ruang hijau strategis (Ibrahim et al., 2023b). Namun, studi perencanaan dan kebijakan menyimpulkan bahwa tanpa jaminan konkret hak adat dan akses informasi, prinsip FPIC (*Free, Prior, Informed Consent*) belum berjalan efektif, menjadikan pembangunan rawan konflik sosial (Suradi et al., 2025). Lebih lanjut, kebijakan lingkungan masih perlu dikonkretkan melalui regulasi teknis dan monitoring pasca-konstruksi (Baharuddin, Nurmandi, Qodir, & Jubba, 2022). Dengan demikian, meskipun konsep *forest city* di IKN menawarkan pendekatan ekologis yang progresif, keberhasilannya sangat bergantung pada perlindungan hak-hak masyarakat adat dan pelibatan mereka secara bermakna. Tanpa regulasi teknis yang jelas dan mekanisme pengawasan lingkungan yang kuat, pembangunan berisiko menciptakan ketimpangan sosial dan degradasi ekologis jangka panjang.

Literatur lainnya juga menunjukkan bahwa *smart city* sangat rentan terhadap ancaman siber jika infrastruktur digital tidak dijaga integritasnya (Albugmi, 2025; Alotaibi, 2025; Jaganraja & Srinivasan, 2024). Di Indonesia, kerangka regulasi *smart city* memberikan dasar untuk transformasi digital kota, namun masih belum diikuti peraturan terpadu pasal penanganan ancaman siber dan interoperabilitas data (Atmaheni & Adianto, 2024). Studi pada Yogyakarta dan Makassar juga menegaskan bahwa interoperabilitas data menjadi fondasi utama guna memitigasi fragmentasi informasi dan meningkatkan human security (Hardi et al., 2025). Oleh karena itu, integritas infrastruktur digital dan perlindungan terhadap ancaman siber menjadi aspek krusial dalam pembangunan smart city yang aman dan berkelanjutan. Tanpa interoperabilitas data yang kuat dan regulasi keamanan yang terpadu, transformasi digital di IKN berpotensi menghadapi disrupsi sistemik yang melemahkan efektivitas tata kelola publik.

Meskipun kajian mengenai pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah banyak dilakukan, sebagian besar penelitian masih berfokus pada aspek teknis seperti tata ruang, infrastruktur, dan pembiayaan, sementara kajian yang secara holistik menelaah desain kelembagaan pemerintahan dalam konteks *smart governance*, keberlanjutan ekologis, dan inklusivitas sosial masih sangat terbatas. Penelitian-penelitian sebelumnya belum secara komprehensif mengkaji bagaimana integrasi kebijakan *Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik* (SPBE), konsep *forest city*, dan prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) dapat membentuk tata kelola pemerintahan yang adaptif, partisipatif, dan tahan terhadap tantangan digital serta konflik sosial-ekologis. Oleh karena itu, kebaruan penelitian ini terletak pada pendekatannya yang menggabungkan perspektif *New Public Governance*, keberlanjutan institusional dan ekologi, serta kesiapan teknologi dan interoperabilitas data dalam satu kerangka analisis yang kritis terhadap rancangan pemerintahan IKN. Pendekatan ini diharapkan dapat menjembatani kesenjangan antara visi normatif pembangunan ibu kota baru dan realitas implementatif di negara berkembang.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: sejauh mana model pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) mencerminkan prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial melalui pendekatan *forest city* dan prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC), serta kesiapan digital melalui integrasi *smart governance* dan interoperabilitas data dalam kerangka SPBE dan One Data Indonesia. Tujuan penelitian

ini adalah untuk mengevaluasi secara kritis desain kelembagaan dan kebijakan pemerintahan IKN dalam mewujudkan tata kelola yang inklusif, adaptif, dan berkelanjutan di tengah tantangan sosial, ekologis, dan digital yang kompleks. Implikasi dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi konseptual dalam pengembangan teori tata kelola pemerintahan modern di negara berkembang, sekaligus menjadi rujukan praktis bagi perumus kebijakan dalam merancang struktur kelembagaan dan regulasi yang responsif, adil, dan berkelanjutan untuk pembangunan IKN dan kota-kota masa depan lainnya di Indonesia.

Metode

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi dokumentasi untuk menggali secara mendalam rancangan model pemerintahan Ibu Kota Negara (IKN) dalam perspektif tata kelola modern dan berkelanjutan. Data dikumpulkan melalui penelusuran dan analisis dokumen resmi pemerintah seperti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2022 tentang Ibu Kota Negara, Peraturan Presiden terkait SPBE dan One Data Indonesia, serta dokumen perencanaan IKN dari Otorita Ibu Kota Nusantara. Selain itu, data sekunder juga diperoleh dari artikel-artikel ilmiah yang relevan, baik jurnal nasional terakreditasi maupun jurnal internasional bereputasi, yang diterbitkan dalam lima tahun terakhir. Literatur yang digunakan mencakup topik tentang *smart governance*, keberlanjutan kota, hak masyarakat adat, dan interoperabilitas data dalam konteks pembangunan perkotaan.

Validasi data dalam penelitian ini dilakukan melalui teknik *triangulasi sumber*, yaitu dengan membandingkan informasi dari berbagai jenis dokumen dan referensi ilmiah untuk menguji konsistensi dan reliabilitas temuan. Analisis dilakukan secara tematik dengan mengkategorikan data ke dalam beberapa tema utama, seperti tata kelola digital, keberlanjutan ekologi dan sosial, serta desain kelembagaan pemerintahan. Proses interpretasi dilakukan secara induktif dengan tetap memperhatikan konteks kebijakan publik dan dinamika sosial-politik yang memengaruhi implementasi model pemerintahan IKN. Dengan metode ini, diharapkan hasil penelitian dapat memberikan gambaran yang komprehensif dan kritis mengenai kesiapan dan tantangan dalam penerapan tata kelola modern di IKN.

Hasil dan Diskusi

Sebagai respons terhadap rumusan masalah mengenai sejauh mana model pemerintahan IKN mencerminkan prinsip tata kelola modern berbasis *New Public Governance* (NPG), keberlanjutan ekologis dan sosial melalui konsep *forest city* dan prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC), serta kesiapan digital dalam kerangka SPBE dan *One Data Indonesia*, bagian ini menyajikan data yang dikompilasi dari dokumen perencanaan IKN, laporan resmi Otorita IKN, serta kajian akademik terkini. Penilaian difokuskan pada tiga dimensi utama: (1) tata kelola dan partisipasi, (2) keberlanjutan lingkungan dan sosial, serta (3) kesiapan teknologi digital. Masing-masing dimensi diukur melalui indikator yang relevan dan disajikan dalam Tabel 1 berikut.

Tabel 1: Tata Kelola Pemerintahan IKN

Dimensi	Indikator	Temuan
Tata Kelola Modern (New Public Governance)	- Partisipasi masyarakat-Keterlibatan multi-aktor-Transparansi dan akuntabilitas kebijakan	Konsultasi publik telah dilakukan, namun belum bersifat deliberatif dan partisipatif secara penuh. Peran masyarakat sipil dan sektor non-negara belum terintegrasi dalam pengambilan keputusan strategis. Mekanisme akuntabilitas publik masih terbatas.
Keberlanjutan Ekologis dan Sosial	- Perencanaan ruang hijau-Pelibatan masyarakat adat-Prinsip FPIC	Desain <i>forest city</i> menunjukkan komitmen ekologis melalui pelestarian lingkungan. Namun, penerapan prinsip FPIC belum menyentuh level pelibatan bermakna masyarakat adat. Akses terhadap informasi proyek masih terbatas di komunitas lokal.
Kesiapan Digital (SPBE dan One Data Indonesia)	- Interoperabilitas data-Layanan digital pemerintahan- Perlindungan data pribadi	Sistem digital pelayanan publik dan basis data bersama telah dirancang. Namun, koordinasi antar-institusi masih belum sepenuhnya sinkron. Perlindungan data pribadi belum ditopang oleh regulasi terpadu dan keamanan siber yang memadai.

Tabel tersebut merefleksikan bahwa prinsip tata kelola modern di IKN sudah memasuki tahap konsultasi publik, tetapi belum mencapai partisipasi deliberatif yang sejati. Dokumentasi dari Bappenas dan Otorita IKN memperlihatkan bahwa dialog publik kerap berlangsung lewat sosialisasi UU dan forum resmi (Humas Otorita Ibu Kota Nusantara, 2023). Namun kajian akademik seperti Hamdani (2020) menegaskan, partisipasi ini masih berada di level simbolik—“tokenism”—di mana masyarakat dilibatkan hanya sebagai formalitas, bukan sebagai pengambil keputusan (Hamdani, 2020). Oleh karena itu, meski akses formal telah dibentuk, substansi keterlibatan aktif dan akuntabilitas publik masih memerlukan penguatan struktural.

Dalam dimensi keberlanjutan ekologis dan sosial, konsep *forest city* menyuarakan komitmen deklaratif terhadap ruang hijau dan rendah karbon, sejalan dengan visi IKN sebagai kota hijau. Namun dari perspektif hak adat, tanggung jawab untuk melaksanakan prinsip FPIC belum sepenuhnya dijalankan. Laporan dari komunitas sipil di Kalimantan Timur menunjukkan minimnya pelibatan masyarakat adat dalam forum konsultasi formal, bahkan muncul penolakannya terhadap rencana IKN yang dianggap tidak inklusif (Ridho, 2024). Hal ini mengindikasikan kesenjangan antara agenda ekologis teknis dan realitas sosial lokal, serta potensi konflik yang belum diantisipasi secara memadai. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun pemerintah memiliki agenda lingkungan yang kuat, keberlanjutan sosial belum menjadi bagian yang setara dalam kerangka kebijakan pembangunan IKN.

Potensi kerusakan lingkungan dalam proyek pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) sangat signifikan, mengingat skala proyek yang masif dan lokasinya yang berada di wilayah dengan keanekaragaman hayati tinggi di Kalimantan Timur. Pembukaan lahan dalam jumlah besar berisiko menyebabkan deforestasi, hilangnya habitat satwa endemik, gangguan terhadap siklus hidrologi, serta meningkatnya emisi karbon akibat perubahan tutupan lahan. Selain itu, pembangunan infrastruktur dasar seperti jalan, gedung pemerintahan, dan kawasan perumahan dapat memicu degradasi tanah, sedimentasi sungai, dan pencemaran sumber air jika tidak dikelola dengan pendekatan lingkungan yang ketat. Meskipun konsep *forest city* diusung sebagai solusi ekologis, tanpa mekanisme pengawasan lingkungan yang kuat dan penegakan regulasi yang tegas, proyek ini tetap rawan menimbulkan dampak ekologis jangka panjang yang bertentangan dengan prinsip pembangunan berkelanjutan.



Gambar 1: Potensi kerusakan lingkungan dalam proyek IKN

Sementara itu, inisiatif SPBE dan One Data Indonesia mengungkap bahwa meskipun infrastruktur dan sistem digital pelayanan publik telah dirancang, penerapannya masih menghadapi kendala dalam hal interoperabilitas dan keamanan data. Pertama, sinkronisasi data antar-institusi belum berjalan mulus—meskipun KemenPAN-RB dan Otorita IKN sudah membahas implementasi *smart government*

dan shared offices sebagai strategi kolaborasi digital (Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, 2023), layanan SPBE belum sepenuhnya terintegrasi pada level operasional yang praktis, sehingga masih ada risiko duplikasi dan ketidakkonsistenan data. Hal ini menunjukkan bahwa pembangunan infrastruktur digital belum dibarengi dengan *repurposing* kelembagaan dan budaya kerja yang mendukung interoperabilitas nyata.

Selanjutnya, regulasi keamanan data dan kesiapan siber IKN masih belum adekuat. Meskipun Presiden dan KemenPAN-RB sudah menggarisbawahi pentingnya infrastruktur SPBE untuk mendukung pemerintahan digital di IKN, temuan lain menekankan bahwa SPBE baru efektif jika keamanan dan perlindungan data (cybersecurity) juga diperkuat (Sensuse, Putro, Rachmawati, & Sunindyo, 2022; Valle-Cruz, Fernandez-Cortez, & Gil-Garcia, 2022; Yang, Elisa, & Eliot, 2019). Demikian pula studi lain menekankan perlunya interoperabilitas sistem sebagai dasar digital public infrastructure, namun masih minim jaminan mengenai proteksi data pribadi dan tanggapan ancaman siber (Hardi et al., 2025). Dengan demikian, tanpa kebijakan keamanan siber yang komprehensif dan peningkatan kapasitas Sumber Daya Manusia TI, transisi digital IKN mungkin akan menghasilkan sistem yang mudah diserang dan rendah kepercayaan publik.

Temuan dalam kajian ini memperlihatkan bahwa pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) telah mengadopsi sejumlah prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis, serta transformasi digital, namun implementasinya masih jauh dari ideal. Dalam hal tata kelola, IKN telah membuka ruang konsultasi publik, tetapi belum menunjukkan mekanisme deliberatif yang memungkinkan warga dan pemangku kepentingan non-negara untuk berkontribusi dalam proses pengambilan keputusan secara substantif. Hal serupa terjadi dalam isu keberlanjutan sosial, di mana konsep forest city memang menampilkan komitmen terhadap lingkungan, namun pelibatan masyarakat adat melalui prinsip Free, Prior, and Informed Consent (FPIC) belum menyentuh tataran operasional. Akibatnya, terjadi ketimpangan antara narasi kebijakan yang ambisius dan realitas di lapangan yang menunjukkan potensi konflik sosial serta risiko marginalisasi komunitas lokal.

Pada dimensi kesiapan digital, pembangunan sistem SPBE dan One Data Indonesia mencerminkan arah yang progresif menuju pemerintahan digital. Akan tetapi, masalah interoperabilitas data antar-institusi dan lemahnya regulasi perlindungan data pribadi menjadi hambatan struktural utama. Koordinasi kelembagaan yang belum solid, serta keterbatasan literasi digital dan sumber daya manusia, mengancam efektivitas dan keandalan sistem digital pemerintahan IKN. Dengan demikian, jika model pemerintahan IKN ingin benar-benar mencerminkan prinsip tata kelola modern dan berkelanjutan, maka integrasi kebijakan yang inklusif, partisipatif, dan responsif di tiga dimensi utama ini harus segera diwujudkan secara holistik dan bukan sekadar retorik.

Tabel 2: Tantangan Utama Implementasi Pemerintahan Modern dan Berkelanjutan di IKN

Kategori Tantangan	Indikator Spesifik	Dampak Potensial
Regulasi & Tata Kelola	Belum sinkronnya kebijakan antar-lembaga (nasional-IKN)	Kesenjangan implementasi antar unit
Sosial & Kelembagaan	Rendahnya pelibatan masyarakat adat dan civil society	Legitimasi sosial rendah, potensi konflik
Teknologi & Infrastruktur Digital	Ketimpangan kapasitas SDM, risiko keamanan siber	Gangguan layanan publik digital & kepercayaan

Salah satu tantangan paling mendasar dalam implementasi pemerintahan modern di IKN adalah fragmentasi regulasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan Otorita IKN (Anirwan, Aljurida, & Baharuddin, 2024; Nurdin & Baharuddin, 2023). Banyak kebijakan strategis seperti SPBE, One Data Indonesia, dan perencanaan tata ruang belum terintegrasi secara vertikal maupun horizontal antar-lembaga. Hal ini menghambat efektivitas koordinasi dan memperlambat pengambilan keputusan lintas sektor (Hardi et al., 2025). Seperti dicatat oleh Syah et al. (2024), ketidaksinkronan regulasi juga berdampak pada tumpang tindih kewenangan dan keraguan birokrasi dalam mengeksekusi kebijakan, terutama ketika tidak ada kejelasan yuridis di level teknis operasional (Syah et al., 2024). Akibatnya, meskipun IKN dirancang sebagai prototipe kota masa depan, tata kelola institusionalnya masih terjebak dalam logika birokrasi konvensional.

Tantangan sosial dan kelembagaan terlihat jelas dalam minimnya partisipasi masyarakat adat dan komunitas sipil dalam proses perencanaan dan pengambilan keputusan di IKN. Meskipun prinsip *Free, Prior, Informed Consent* (FPIC) diakui dalam dokumen kebijakan, penerapannya belum menyentuh level operasional yang menjamin keterlibatan bermakna. Studi dari Ibrahim et al. (2023) menunjukkan bahwa hanya sebagian kecil kelompok adat lokal yang dilibatkan secara formal dalam forum konsultasi. Ketidakhadiran masyarakat adat dalam proses ini berisiko menciptakan delegitimasi sosial terhadap pembangunan, serta membuka peluang munculnya konflik agraria dan budaya. Hal ini bertentangan dengan semangat inklusivitas sosial dalam *New Public Governance*, yang menekankan kolaborasi dan deliberasi antarpihak dalam pengambilan keputusan publik (Amin & Aboelenein, 2025).

Dalam aspek teknologi dan digitalisasi, tantangan paling nyata adalah ketimpangan kapasitas sumber daya manusia (SDM) dan kesiapan infrastruktur siber. Meskipun IKN dirancang dengan pendekatan *smart governance*, belum semua lembaga dan individu yang akan bekerja di sana memiliki literasi digital dan pemahaman tentang keamanan data yang memadai. Hal ini diperkuat oleh temuan Wang et al. (2022) yang menyatakan bahwa kota-kota baru berbasis digital cenderung rentan terhadap serangan siber jika tidak dibarengi dengan sistem pertahanan TI yang kuat. Di Indonesia, regulasi terkait keamanan data publik dan pribadi masih bersifat sektoral dan belum menjangkau sistem *One Data* secara terpadu (Suryawijaya, 2023; Ujung, Irwan, & Nasution, 2023). Dengan demikian, tanpa peningkatan kapasitas SDM dan penguatan regulasi keamanan siber, layanan publik digital di IKN dapat mengalami disrupsi sistemik yang mengancam kredibilitas tata kelola pemerintahannya.

Untuk mengatasi tantangan regulasi, sosial, dan digital dalam pembangunan model pemerintahan IKN, langkah pertama yang perlu dilakukan adalah membangun kerangka regulasi yang sinkron dan terintegrasi antara pemerintah pusat, Otorita IKN, dan kementerian teknis. Harmonisasi ini dapat dicapai melalui peraturan pelaksana yang jelas dan mekanisme koordinasi antar-lembaga berbasis data terbuka, serta forum lintas sektor yang rutin (Razak, Baharuddin, & Rusliadi, 2024). Pemerintah juga perlu memperkuat dasar hukum *One Data Indonesia* dan SPBE dengan memastikan adanya interoperabilitas data lintas institusi, serta menyediakan pedoman teknis dan insentif bagi pemda dan institusi untuk menerapkan standar digitalisasi yang seragam. Pembentukan unit kerja lintas kementerian yang khusus mengawal transformasi kelembagaan IKN juga penting agar tidak terjadi stagnasi atau konflik kewenangan selama proses transisi kelembagaan berlangsung.

Di sisi sosial dan teknologi, pendekatan kolaboratif berbasis *inclusive governance* harus dikedepankan dengan menjamin pelaksanaan prinsip *Free, Prior, and Informed Consent* (FPIC) secara operasional kepada komunitas adat dan warga terdampak. Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan ruang dialog formal yang melibatkan perwakilan adat, masyarakat sipil, dan akademisi secara sistematis dalam siklus perencanaan dan evaluasi. Sementara itu, tantangan teknologi dan keamanan digital dapat diatasi dengan meningkatkan literasi digital birokrasi dan publik melalui pelatihan berkelanjutan serta penguatan sistem keamanan siber berbasis risiko (Isabella, Alfitri, Saptawan, Nengyanti, & Baharuddin, 2024). Pemerintah perlu menetapkan standar minimum perlindungan data serta menyusun roadmap nasional keamanan siber yang khusus disesuaikan dengan konteks pemerintahan digital IKN, sehingga mampu mencegah fragmentasi teknologi dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap transformasi digital pemerintahan.

Upaya mengatasi tantangan regulasi, sosial, dan teknologi sebagaimana dijelaskan sebelumnya memiliki kaitan erat dengan tujuan utama dari pembangunan IKN sebagai model pemerintahan modern dan berkelanjutan. Dalam konteks ini, pembangunan IKN bukan hanya proyek fisik, tetapi merupakan transformasi institusional yang menuntut tata kelola berbasis kolaborasi (*New Public Governance*), inklusivitas sosial, dan efisiensi digital. Dengan membangun sistem regulasi yang sinkron dan mendorong interoperabilitas data antar-lembaga, IKN dapat menjadi prototipe kota yang mampu menjalankan fungsi pemerintahan secara responsif dan transparan, sekaligus menjadi episentrum pengelolaan kebijakan publik berbasis bukti (*evidence-based policy*). Hal ini sejalan dengan semangat reformasi birokrasi yang tidak hanya fokus pada efisiensi administratif, tetapi juga menjamin legitimasi demokratis melalui pelibatan multi-aktor.

Lebih lanjut, keberhasilan IKN dalam mewujudkan pemerintahan berkelanjutan akan sangat bergantung pada kemampuannya mengintegrasikan dimensi sosial dan ekologi ke dalam proses tata kelola. Penjaminan hak masyarakat adat melalui implementasi prinsip FPIC dan penguatan keamanan digital menjadi prasyarat untuk membangun kepercayaan publik terhadap proyek ini. Jika tantangan

sosial dan digital dikelola dengan baik, maka IKN tidak hanya menjadi kota cerdas secara teknologi, tetapi juga menjadi kota adil dan tangguh secara sosial. Dalam perspektif kritis, pembangunan IKN adalah momentum untuk menguji sejauh mana negara mampu menghadirkan pemerintahan yang modern bukan hanya dalam infrastruktur, tetapi juga dalam prinsip etika, demokrasi, dan keberlanjutan yang substansial.

Telaah kritis terhadap desain kelembagaan dan kebijakan pemerintahan Ibu Kota Nusantara (IKN) menunjukkan bahwa hingga saat ini fokus pembahasan lebih dominan menyoroti output normatif seperti partisipasi publik, keberlanjutan ekologis, dan kesiapan digital. Namun, belum terdapat evaluasi yang mendalam mengenai bagaimana arsitektur kelembagaan dan konfigurasi kebijakan IKN secara sistemik dirancang untuk mendukung prinsip-prinsip *smart governance* dan *New Public Governance*. Kedua pendekatan ini tidak hanya menekankan pada hasil kebijakan, tetapi juga pada struktur tata kelola yang adaptif, responsif, dan kolaboratif. Dalam konteks ini, belum tampak adanya desain institusional yang mengatur secara jelas peran dan interaksi antar aktor negara dan non-negara, mekanisme pembagian kewenangan lintas sektor, serta pengaturan tata kelola data dan evaluasi berbasis kinerja yang menjadi ciri utama *smart governance*. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun IKN mengadopsi istilah-istilah progresif, seperti *forest city* atau SPBE, belum ada kejelasan apakah perangkat kelembagaan yang dibangun telah mendukung transformasi pemerintahan yang cerdas dan kolaboratif.

Lebih jauh, kelembagaan Otorita IKN saat ini tampak beroperasi dalam kerangka top-down yang sangat terpusat, dengan kewenangan luas yang diberikan melalui UU Nomor 3 Tahun 2022. Meskipun hal ini dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan, pendekatan ini berisiko bertentangan dengan semangat NPG yang mengedepankan kolaborasi lintas aktor dan keterbukaan dalam pengambilan keputusan. Selain itu, belum terlihat adanya peta jalan kelembagaan (*institutional roadmap*) yang menjelaskan bagaimana IKN akan membangun sistem pemerintahan yang adaptif terhadap perubahan lingkungan eksternal, seperti dinamika sosial-politik atau tantangan teknologi baru. Kurangnya pendekatan desain kelembagaan berbasis prinsip adaptabilitas, keterhubungan (*interoperability*), dan *co-creation* dengan masyarakat sipil menjadikan model pemerintahan IKN rawan terjebak dalam logika birokratis lama, alih-alih menjadi pionir tata kelola publik modern. Dengan demikian, pembaruan kelembagaan bukan hanya soal struktur organisasi, tetapi juga harus menyentuh logika operasional, etika tata kelola, dan desain kebijakan yang membuka ruang partisipasi serta inovasi dari berbagai pemangku kepentingan.

Kesimpulan

Konsep desain kelembagaan dan kebijakan pembangunan Ibu Kota Negara (IKN) secara normatif diarahkan untuk mewujudkan tata kelola yang modern, responsif, dan efisien. Pembentukan Otorita IKN sebagai badan khusus setingkat kementerian menunjukkan upaya negara dalam membangun struktur kelembagaan yang memiliki fleksibilitas administratif dan kewenangan luas dalam pengambilan keputusan lintas sektor. Desain ini memungkinkan percepatan dalam pelaksanaan proyek strategis, sekaligus menciptakan jalur koordinasi langsung antara pusat dan IKN. Namun, secara substantif, desain kelembagaan ini masih minim dalam aspek demokratisasi tata kelola. Mekanisme checks and balances belum tampak secara tegas, begitu pula forum deliberatif yang memungkinkan aktor non-negara, seperti masyarakat sipil, komunitas adat, dan akademisi, untuk terlibat secara sistemik dalam proses kebijakan. Dengan demikian, kelembagaan IKN belum sepenuhnya mencerminkan prinsip *New Public Governance* dan *smart governance* yang menekankan pada keterbukaan, kolaborasi, dan partisipasi lintas sektor.

Temuan utama dari kajian ini mengindikasikan bahwa meskipun IKN telah mengadopsi prinsip-prinsip tata kelola modern, keberlanjutan ekologis dan sosial, serta transformasi digital, penerapannya masih menghadapi hambatan struktural dan substantif. Pada aspek tata kelola, partisipasi publik masih bersifat simbolik dan belum membentuk ruang deliberasi yang setara. Dalam aspek ekologis, konsep *forest city* memang menawarkan kerangka pembangunan hijau, tetapi pelibatan masyarakat adat melalui prinsip *Free, Prior, and Informed Consent (FPIC)* belum berjalan secara bermakna. Sementara itu, di bidang digital, inisiatif SPBE dan One Data Indonesia menunjukkan langkah progresif, namun tidak diimbangi dengan kesiapan kelembagaan, koordinasi lintas instansi, dan perlindungan data yang kuat. Oleh karena itu, untuk mewujudkan pemerintahan IKN yang modern, adil, dan berkelanjutan,

diperlukan integrasi yang konsisten antara desain kelembagaan, substansi kebijakan, dan pelibatan aktor-aktor lokal dalam setiap tahapan pembangunan. Pendekatan inklusif dan berbasis kolaborasi lintas sektor menjadi kunci agar IKN benar-benar menjadi prototipe kota masa depan yang tidak hanya unggul secara fisik, tetapi juga kuat dalam dimensi etika tata kelola dan keadilan sosial.

Referensi

- Albugmi, A. (2025). Hybrid smart IoT detection and prevention framework for smart cities using blockchain technology. *International Journal of Advanced and Applied Sciences*, 12(4), 107–115. <https://doi.org/10.21833/ijaas.2025.04.013>
- Alotaibi, J. (2025). A hybrid software-defined networking approach for enhancing IoT cybersecurity with deep learning and blockchain in smart cities. *Peer-to-Peer Networking and Applications*, 18(3), 12083. <https://doi.org/10.1007/s12083-025-01935-8>
- Amin, N. Z., & Aboelenein, M. (2025). New Public Governance as a Mediator Between Health Policies and Social Security in Egypt Under the Outbreak of Covid-19. *Advances in Science, Technology and Innovation*, 29–40. https://doi.org/10.1007/978-3-031-78904-5_3
- Anirwan, A., Aljurida, A. M. A., & Baharuddin, T. (2024). Developing a New Capital City (IKN) In Indonesia: A Thematic Analysis. *Policy & Governance Review*, 8(1), 1. <https://doi.org/10.30589/pgr.v8i1.863>
- Atmaheni, A. A., & Adianto, J. (2024). Indonesia's Smart City: Does Legal Framework Matter? *International Journal of Built Environment and Scientific Research*, 08(02), 93–104.
- Baharuddin, T., Nurmandi, A., Qodir, Z., & Jubba, H. (2022). Bibliometric Analysis of Socio-Political Research on Capital Relocation: Examining Contributions to the Case of Indonesia. *Journal of Local Government Issues (LOGOS)*, 5(1), 17–31. <https://doi.org/https://doi.org/10.22219/logos.v5i1.19468>
- Cardullo, P. (2020). Citizens in the “smart city”: Participation, co-production, governance. *Citizens in the “Smart City”: Participation, Co-Production, Governance*, 1–164. <https://doi.org/10.4324/9780429438806>
- Hamdani, R. S. (2020). Proyek Lintas Batas Administrasi: Analisis Partisipasi Publik dalam Proses Perencanaan Ibu Kota Negara Republik Indonesia. *Journal of Regional and Rural Development Planning*, 4(1), 43–62. <https://doi.org/10.29244/jp2wd.2020.4.1.43-62>
- Hardi, R., Nurmandi, A., Purwaningsih, T., & Manaf, H. A. (2025). Smart city governance and interoperability: enhancing human security in Yogyakarta and Makassar, Indonesia. *Frontiers in Political Science*, 7(March). <https://doi.org/10.3389/fpos.2025.1553177>
- Herdiyanti, A., Hapsari, P. S., & Susanto, T. D. (2019). Modelling the smart governance performance to support smart city program in Indonesia. *Procedia Computer Science*, 161, 367–377. <https://doi.org/10.1016/j.procs.2019.11.135>
- Hernawan, D. (2023). Assessing the Impact of Land Development Regulations on Customary Land Values: A Case Study of Rempang and IKN in Indonesia. *Society*, 11(2), 644–664. <https://doi.org/10.33019/society.v11i2.584>
- Humas Otorita Ibu Kota Nusantara. (2023). Bappenas dan Otorita IKN Libatkan Publik dalam Sosialisasi Perubahan UU IKN. Retrieved June 22, 2025, from [ikn.go.id](https://www.ikn.go.id) website: <https://www.ikn.go.id/bappenas-dan-otorita-ikn-libatkan-publik-dalam-sosialisasi-perubahan-uu-ikn>

- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023a). Bibliometric Analysis of E-Government and Trust: A Lesson for Indonesia. *Jurnal Borneo Administrator*, 19(3), 269–284. <https://doi.org/10.24258/jba.v19i3.1303>
- Ibrahim, A. H. H., Baharuddin, T., & Wance, M. (2023b). Developing a Forest City in a New Capital City: A Thematic Analysis of the Indonesian Government's Plans. *Jurnal Bina Praja*, 15(1), 1–13. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.1-13>
- Isabella, Alfitri, Saptawan, A., Nengyanti, & Baharuddin, T. (2024). Empowering Digital Citizenship in Indonesia: Navigating Urgent Digital Literacy Challenges for Effective Digital Governance. *Journal of Governance and Public Policy*, 11(2), 142–155. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v11i2.19258>
- Jaganraja, V., & Srinivasan, R. (2024). An agile solution for enhancing cybersecurity attack detection using deep learning privacy-preservation in IoT-smart city. *Wireless Networks*, 11276. <https://doi.org/10.1007/s11276-024-03876-1>
- Kalalinggi, R., Hisdar, M., Sarmiasih, M., & Wijaya, A. K. (2023). Forecasting The Development of IKN (New National Capital) in Sustainable Development , Indonesia. *Journal of Governance and Public Policy*, 10(1), 48–59. <https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i1.16786>
- Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. (2023). Duduk Bersama Otorita IKN, Menteri PANRB Bahas Implementasi “Smart Government” di IKN. Retrieved June 21, 2025, from menpan.go.id website: <https://menpan.go.id/site/berita-terkini/duduk-bersama-otorita-ikn-menteri-panrb-bahas-implementasi-smart-government-di-ikn>
- Kencana, W. H., Situmeang, I. V. O., Meisyanti, M., Rahmawati, K. J., Nugroho, H. S., & Lubis, A. Y. (2023). Digital Communication Transformation in Sukabumi City Government. *Komunikator*, 15(1), 80–90. <https://doi.org/10.18196/jkm.17206>
- Nuridin, M., & Baharuddin, T. (2023). Capacity Building Challenges and Strategies in the Development of New Capital City of Indonesia. *Jurnal Bina Praja*, 15(2), 221–232. <https://doi.org/https://doi.org/10.21787/jbp.15.2023.221-232>
- Nurkaidah, Anas, A., & Baharuddin, T. (2024). Implementation of environmental policies on the development of a new capital city in Indonesia. *Cogent Social Sciences*, 10(1), 2297764. <https://doi.org/10.1080/23311886.2023.2297764>
- Pratama, A. B., & Imawan, S. A. (2019). A scale for measuring perceived bureaucratic readiness for smart cities in Indonesia. *Public Administration and Policy*, 22(1), 25–39. <https://doi.org/10.1108/PAP-01-2019-0001>
- Razak, A. R., Baharuddin, T., & Rusliadi, R. (2024). Healthy city development: Indonesian government plans to build a new capital city. *Journal of Infrastructure, Policy and Development*, 8(11), 1–17. <https://doi.org/10.24294/jipd.v8i11.6482>
- Ridho, M. R. (2024, September 8). IKN, Inklusivitas Pembangunan, dan Problem Partisipasi. *Kaltimtoday.Co*. Retrieved from <https://kaltimtoday.co/ikn-inklusivitas-pembangunan-dan-problem-partisipasi>
- Rifaid, Abdurrahman, Baharuddin, T., & Kusuma, B. M. A. (2023). Smart City Development in the New Capital City : Indonesian Government Plans. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 4(2), 115–130. <https://doi.org/https://doi.org/10.46507/jcgpp.v4i2.141>

- Rifaid, Rachman, M. T., Baharuddin, T., & Gohwong, S. (2023). Public Trust : Indonesian Policy in Developing a New Capital City (IKN). *Journal of Governance and Public Policy*, 10(3), 263–273. <https://doi.org/https://doi.org/10.18196/jgpp.v10i3.17681>
- Ruhlandt, R. W. S. (2018). The governance of smart cities: A systematic literature review. *Cities*, 81, 1–23. <https://doi.org/10.1016/j.cities.2018.02.014>
- Sensuse, D. I., Putro, P. A. W., Rachmawati, R., & Sunindyo, W. D. (2022). Initial Cybersecurity Framework in the New Capital City of Indonesia: Factors, Objectives, and Technology. *Information (Switzerland)*, 13(12), 580. <https://doi.org/10.3390/info13120580>
- Suradi, S., Koeswinarno, K., Fakhrudin, M., Aswin, A., Silitonga, M. C. A., Rahmawati, A., & Zakiyah. (2025). Voices of Indigenous Peoples on National Capital Relocation: Evidence from Indonesia. *Lex Localis*, 23(1), 68–90. [https://doi.org/10.52152/23.1.68-90\(2025\)](https://doi.org/10.52152/23.1.68-90(2025))
- Suryawijaya, T. W. E. (2023). Memperkuat Keamanan Data melalui Teknologi Blockchain: Mengeksplorasi Implementasi Sukses dalam Transformasi Digital di Indonesia. *Jurnal Studi Kebijakan Publik*, 2(1), 55–68. <https://doi.org/10.21787/jskp.2.2023.55-68>
- Syah, A. F., Sacipto, R., Yasin, A., Maemunah, S., Nuryadin, D., & Mutaqin, M. (2024). Smart City Implementation in Indonesian Regions: Juridical and Empirical Review. *E3S Web of Conferences*, 594. <https://doi.org/10.1051/e3sconf/202459404004>
- Ujung, A. M., Irwan, M., & Nasution, P. (2023). Pentingnya Sistem Keamanan Database untuk melindungi data pribadi. *JISKA: Jurnal Sistem Informasi Dan Informatika*, 1(2), 44. Retrieved from <http://jurnal.unidha.ac.id/index.php/jteksis>
- Valle-Cruz, D., Fernandez-Cortez, V., & Gil-Garcia, J. R. (2022). From E-budgeting to smart budgeting: Exploring the potential of artificial intelligence in government decision-making for resource allocation. *Government Information Quarterly*, Vol. 39, p. 101644. <https://doi.org/10.1016/j.giq.2021.101644>
- Yang, L., Elisa, N., & Eliot, N. (2019). Privacy and security aspects of E-government in smart cities. *Smart Cities Cybersecurity and Privacy*, 89–102. <https://doi.org/10.1016/B978-0-12-815032-0.00007-X>
- Yulianto, T., Hakim, L., Noor, I., & Suryadi, S. (2023). Implementation of Electronic Government in Indonesia. *ICoPAG 2022*, (95), 417–425. Atlantis Press SARL. https://doi.org/10.2991/978-2-38476-082-4_37
- Zitri, I., Rifaid, & Lestanata, Y. (2023). Implementation of E-Government Policy from Governor Muhammad Zainul Madji (TGB) Era to Governor Zulkieflimansyah Era in West Nusa Tenggara Province Implementasi Kebijakan E-Government Era Gubernur Muhammad Zainul Madji (TGB) Sampai Era Gubernur Zulkieflim. *Jurnal Aristo*, 11(1), 146–172. <https://doi.org/10.24269/ars.v11i1.5322>